



Serius Urus Kemiskinan



HARAPAN GUNAWAN/RADAR JOGJA

Kricak Masuk Wilayah Penduduk Miskin

JOGJA - Pemkot Jogja mengarahkan bidikan khusus kepada warga yang berstatus miskin. Program pengentasan kemiskinan pun dirancang ulang. Sebab, selama ini program tersebut dinilai

masih jauh dari harapan. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya wilayah di Kota Jogja yang belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) memadai.

DPRD Kota Jogja juga menaruh perhatian terhadap realitas ini. Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) dan Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono (IP) pun punya semangat yang sama. Mereka bertekad segera mencari solusi untuk mengentaskan kemiskinan.

Haryadi menunjukkan keseriusannya dengan memantau langsung hunian dalam program bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)

SEMANGAT YO...: Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (empat dari kanan) berbincang dengan warga yang tinggal di RT 60 RW 01 Kampung Kricak, Jatimulyo, Tegalrejo, Jogja kemarin (17/11).

► Baca *Serius...* Hal 11

Wali Kota Minta Pemanfaatan Dana Diawasi

■ SERIUS...

Sambungan dari hal 1

"Wilayah yang menjadi target yakni Kampung Kricak, Jatimulyo, Tegalrejo RT 60 RW 01. Di kampung itu terdapat 50 kepala keluarga (KK). Mayoritas belum memiliki MCK di rumahnya.

HS datang ke kampung itu bersama Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aman Yuriadjaya dan Forum Pemantau Independen (Forpi). "Warga Jogja berhak untuk sejahtera. Pemkot punya komitmen kuat terhadap itu," jelas HS.

Kemenpera memberikan bantuan 266 rumah di Kricak. Khusus di RT 60 RW 01 baru 11 rumah yang mendapat bantuan. Bantuan itu berupa asbes, kayu, besi, semen, dan pasir. Nilai bantuan material tersebut berbeda-beda antara Rp 6 juta dan Rp 11 juta. Besaran bantuan didasarkan kondisi tempat tinggal masing-masing warga.

Ketua RT 60 RW 01 Sugino

mengatakan, di wilayahnya terdapat 50 kepala keluarga (KK). Mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka bekerja sebagai pekerja serabutan, tukang bangunan, dan berdagang.

Di wilayah itu terdapat banyak hunian yang kurang layak huni. Selain itu, masih banyak warga yang buang air besar di aliran Kali Winongo. Itu dilakukan lantaran minimnya jamban.

"RT 60 ini wilayah termiskin di Kota Jogja. Harapan yang diinginkan warga ya dapat bisa hidup layak," jelas Sugiono.

Wali Kota mengaku memahami. Dia menegaskan kebutuhan mendesak yang perlu dilakukan di wilayah itu adalah segera membuat fasilitas MCK.

Bambang Irawan, warga RT 60, mengatakan, satu unit MCK di wilayahnya bisa dipakai untuk tiga hingga empat kepala keluarga. Hal ini yang membuat keadaan darurat saat aktivitas padat di pagi hari. Misalnya, saat anak-anak bersiap untuk bersekolah.

Idealnya, kata dia, fasilitas MCK ditambah. Setidaknya, ditambah sekitar 20 unit. Ini untuk mengantisipasi antrean panjang warga yang ingin membuang hajat saat jam-jam aktivitas padat. Sebab, antrean yang panjang membuat sebagian warga memilih untuk membuang hajat di Kali Winongo.

"Ya kalau idealnya ditambah 20 unit. Tetapi kalau memang pemkot mau membantu nantinya satu MCK untuk satu KK sehingga terjaga kebersihannya," ucap Bambang.

Sekitar 30 menit Wali Kota berdialog dengan warga. Sejumlah perwakilan warga mengungkapkan persoalan yang mereka hadapi. Suami dari Iri Kirana Muslidatun tersebut terlihat menyimah dengan seksama uneg-uneg yang dilontarkan warga.

Persoalan yang diungkapkan antara lain sumber air untuk mandi dan air minum yang mengandung bakteri ecoli. "Itu

membuat kami resah," jelasnya.

Selain itu, sejumlah warga juga memberikan masukan kepada wali kota. Yakin, akses jalan yang sangat minim. Warga yang tinggal di RT 60 RW 01 tidak dapat keluar karena akses jalan ditutup. Terlebih, tidak ada akses jalan alternatif sehingga warga mesti memutar lebih jauh.

Selain itu, di kampung itu juga tidak adanya informasi seperti koran yang ditempel. Warga berharap pemkot bersedia membuat papan informasi yang dapat ditempel koran agar warga dapat memperoleh informasi.

Warga juga menyatakan persoalan yang ada sudah tidak layak. Pos itu hampir roboh.

Menanggapi hal tersebut, Haryadi Suyuti menyatakan siap mengambil langkah nyata. Dia menegaskan pemkot sudah mengalokasikan dana kurang lebih Rp 1 miliar untuk melakukan renovasi RTLH dalam APBD Perubahan 2013. Dana

itu siap dimanfaatkan jika DPRD Kota Jogja sudah memberikan persetujuan atas evaluasi yang telah diberikan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X.

HS juga meminta semua pihak aktif mengawasi pemanfaatan dana tersebut. Termasuk Forpi sebagai lembaga integritas untuk memantau aliran dana yang akan diberikan. Termasuk saya pribadi, juga diawasi sehingga ada transparansi," ujar dia.

HS mengakui masih banyak warga miskin di Kota Jogja. Ini menjadi pekerjaan bersama untuk perlu dikelola lebih baik dan serius. Dia yakin program pengentasan kemiskinan dapat berjalan sesuai harapan.

Berlandaskan semangat Segoro Amarto, menurut dia, dorongan untuk lebih baik kian kuat. Warga miskin di Kricak pun berhak hidup layak seperti warga di wilayah lain Kota Jogja.

"Ya semua uneg-uneg dari warga sudah saya pahami. Saya akan membahas dengan SKPD terkait agar segera merealisasikannya," ucapnya.

Anggota Forpi Kota Jogja Hary Cahya mengatakan siap melakukan pengawasan ketat sehingga aliran dana bantuan pemkot tepat sasaran dan transparan. Dia bahkan menegaskan akan menggendong lurah dan camat setempat untuk mewujudkan program RTLH dari pusat dan daerah.

"Kami siap untuk mengawasi jika terjadi pelanggaran dalam proses di lapangan dan administrasi. Semua anggota Forpi saya kira siap karena sudah diminta oleh Wali Kota," tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Ali Fahmi mengkritik kebijakan wali kota terkait penanganan kemiskinan. Dia

menilai pemkot kurang serius. Padahal, pemkot memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang sudah melakukan pemetaan warga maupun kampung dengan penduduk miskin.

"Pemkot sudah melakukan pemetaan dan memiliki TKPK. Seharusnya Wali Kota bisa bekerja cepat dan bisa melakukan intervensi langkah yang harus dilakukan segera," paparnya.

Fahmi melihat buruknya komunikasi dengan dewan membuat program pemkot tidak berjalan maksimal. Ia berharap pola komunikasi yang dibangun eksekutif dapat lebih bersinergi dengan legislatif.

"Saat ini komunikasi tidak berjalan baik. Lebih berjalan sendiri-sendiri. Termasuk komunikasi dengan fraksi di dewan perlu diperbaiki," imbuhnya. (hrp/amd/nn)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Pemukiman dan Prasarana | Positif | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Kecamatan Kemantren Tegalarjo | | | |
| 3. Kelurahan Kricak | | | |
| 4. | | | |

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005